BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan perairan terluas yang ada di Asia Tenggara. Luas wilayah laut Indonesia mencapai sekitar 3.257.357 KM^2. Indonesia telah menjadi jalur utama transportasi global yang sibuk dengan berbagai model transportasi yang menghubungkan dengan benua lainnya (Sianipar et al., 2025). Laut sendiri memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia yakni sebagai media pemersatu bangsa, media penghubung, media sumber daya alam, media pertahanan dan keamanan serta media untuk membangun pengaruh (Mardiyah et al., 2023). Oleh Karena itu transportasi laut memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang, selain menjadi simpul konektivitas antar pulau juga merupakan penghubung dan pendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia (Ariyana, 2021).

Indonesia dengan sumber daya kelautannya memiliki cita-cita yaitu menjadi negara poros maritim dunia (Nikawanti, 2021). Ini merupakan sebuah kekuatan dari bangsa Indonesia yang termaksud dalam Deklarasi Djuanda yang dikenal sebagai *Archipelagic State* atau negara kepulauan oleh komunitas internasional (Fathiraini et al., 2022). Indonesia memiliki keunggulan dibidang maritim yang tidak dimiliki oleh negara lain, yang mampu membawa negara Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju (Pandjaitan et al., 2025).

Pada dunia pelayaran yang merupakan suatu bisnis, dibutuhkan suatu sistem yang dapat melayani pekerjaan diatas kapal sebagai tujuan pada kelancaran pengoperasian kapal secara baik. Pelayaran memegang andil penting dalam sistem transportasi laut Indonesia, yang menghubungkan seluruh pulau serta mendukung pendistribusian barang dan mobilitas penduduk antar pulau (Hadiningrat et al., 2024).

Setiap kapal yang akan hendak berlayar perlu memenuhi persyaratan kelaiklautan, sehingga menjamin keselamatan kapal, anak buah kapal (ABK), dan muatannya selama pelayaran di laut maupun pada saat bersandar di pelabuhan. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (Widodo et al., 2023). Pemenuhan setiap persyaratan kalaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Komponen-komponen yang harus dipersiapkan di dalam menyiapkan kapal layak laut adalah membuat sesuatu keadaan kapal siap beroperasi setelah memenuhi sehubungan dengan persyaratan keamanan dan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran diperairan yang disebabkan oleh kegiatan operasional kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan ABK, kesehatan penumpang, status hukum kapal dan sertifikasi, manajemen keselamatan, manajemen kemanan kapal untuk dapat berlayar di suatu perairan (Widodo et al., 2023).

Untuk kelancaran dan kepatuhan hukum di setiap aktivitas kapal, sangatlah penting untuk memiliki sertifikat dan dokumen kapal yang aktif. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk kegiatan maritim, sehingga operasi menjadi sah setelah disertifikasi. Berdasarkan pasal 2 ayat 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran di atur bahwa setiap kapal yang berlayar harus memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar.

Proses mendapatkan sertifikat melibatkan beberapa pertimbangan. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang ini, menerbitkan berbagai sertifikat yang mengklasifikasikan berbagai jenis kapal, termasuk kapal komersial,

kapal tanker, dan kapal konstruksi (Lilis et al., 2022). Dijelaskan bahwa Syahbandar setelah memastikan bahwa pemohon telah memenuhi kriteria yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan berlayar. Data yang akurat sangat penting bagi keputusan Syahbandar yang dimana dapat diperoleh secara eksklusif dari Badan Usaha Milik Negara, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Dengan data dari BKI, Syahbandar dapat menerbitkan dokumen yang diperlukan agar kapal dapat melakukan aktivitas maritim (Yusnidah et al., 2024).

Pada saat melakukan praktek darat di PT Berlian Samudera Khatulistiwa, penulis diminta untuk melakukan pengurusan sertifikat kapal untuk Kapal TB Astar 5 yang masa berlaku sertifikat telah habis. Oleh karena itu penulis sebagai agen ditargetkan untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat segera sebelum kapal berangkat. Namun pada kenyataannya, sampai waktu yang telah ditentukan pengurusan sertifikat belum selesai. Akibatnya, pada saat pemeriksaan dokumen, kapal dinyatakan tidak laiklaut, karena sertifikat keselamatan tersebut masih dalam proses perpanjangan, sehingga pihak KSOP atau pemeriksa tidak memberikan izin gerak untuk berlayar. Peneliti tertarik untuk menganalisis proses perpanjangan sertifikat keselamatan Kapal TB AS Star 5 Pada PT Berlian Samudera Khatulistiwa.

B. Rumusan Masalah

A. Bagaimana proses pelaksanaan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal TB AS STAR 5 pada PT Berlian Samudera Khatulistiwa?
B. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh PT Berlian Samudera Khatulistiwa untuk mengatasi hambatan dalam proses perpanjangan sertifikat tersebut agar operasional kapal tidak terganggu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alur prosedur perpanjangan sertifikat keselamatan kapal TB AS STAR 5 pada PT Berlian Samudera Khatulistiwa.

2. Untuk merumuskan dan menjelaskan solusi atau upaya yang diambil perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut guna memastikan kalaiklautan kapal secara tepat waktu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Hasil penelitian ini dapat memperkaya studi kasus di bidang manajemen kelaiklautan dan operasional pelabuhan, khususnya dalam konteks implementasi survei periodik dan penanganan risiko kegagalan perpanjangan sertifikat kapal tunda. Penelitian ini dapat menjadi sumber data empiris yang menjembatani regulasi dan praktik riil di lapangan.
   b. Referensi Ilmiah: Menjadi acuan bagi penelitian lanjutan mengenai efisiensi birokrasi dan manajemen *compliance* dalam industri pelayaran Indonesia.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi PT Berlian Samudera Khatulistiwa Memberikan rekomendasi strategis berbasis data untuk peningkatan SOP internal, terutama sistem peringatan dini (alarm) dan *checklist* persiapan survei, untuk meminimalkan *idle time* kapal akibat keterlambatan perpanjangan sertifikat.

   b. Bagi Instansi Pemerintahan (KSOP Balikpapan) Menyajikan umpan balik faktual mengenai titik-titik sumbat (*bottlenecks*) yang dihadapi perusahaan pelayaran selama proses perpanjangan, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan layanan survei, alokasi PPKK (Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal) atau sosialisasi regulasi.

   c. Bagi Komunitas Maritim: Menyediakan pemahaman praktis mengenai kompleksitas mempertahankan kelaiklautan kapal

secara berkelanjutan dan strategis, menekankan pentingnya disipli manajemen kelaiklautan